

## **STUDI TENTANG STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI PESISIR PANTAI TELUK TOMINI DALAM UPAYA PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Irwan Waris<sup>1</sup>, Ani Susanti<sup>2</sup>, Yobert Kornelius<sup>3</sup>, Fakhruddin Hari Anggara Putra<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Dosen pada Program Studi Pemerintahan, FISIP Univ Tadulako Palu.

<sup>2</sup>Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Univ Tadulako Palu

<sup>3</sup>Dosen pada Program Studi Manajemen, Fak Ekonomi, Univ Tadulako Palu

<sup>4</sup>Dosen pada Program Studi Perikanan, Fak Peternakan dan Perikanan, Univ Tadulako Palu

E-mail: [irwanwaris@yahoo.co.id](mailto:irwanwaris@yahoo.co.id).

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menyiapkan nelayan di Kabupaten Parigi Moutong berdaya dari segi non teknologi dan teknologi perikanan dan budidaya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan, memiliki produktifitas tinggi, selanjutnya berkontribusi terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. Untuk kepentingan itu penelitian ini merumuskan model strategi pemberdayaan nelayan untuk selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam menyiapkan draft naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Regulasi tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan utama dalam upaya melindungi dan memberdayakan nelayan sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kab. Parigi Moutong pada khususnya, Sulawesi Tengah, dan Indonesia pada umumnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian tahun ke-2 dari rencana 2 (dua) tahun, maka aktifitas yang dilakukan selama penelitian adalah: melakukan penyempurnaan data dan informasi, berupa verifikasi data, pencarian data dan informasi baru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Aktifitas penelitian ini juga dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi, justifikasi, dan upaya mendapatkan masukan dari masyarakat untuk memperkaya dan menyempurnakan penyiapan model strategi pemberdayaan nelayan yang selanjutnya menjadi dasar penyiapan draft Naskah Akademik (NA) dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

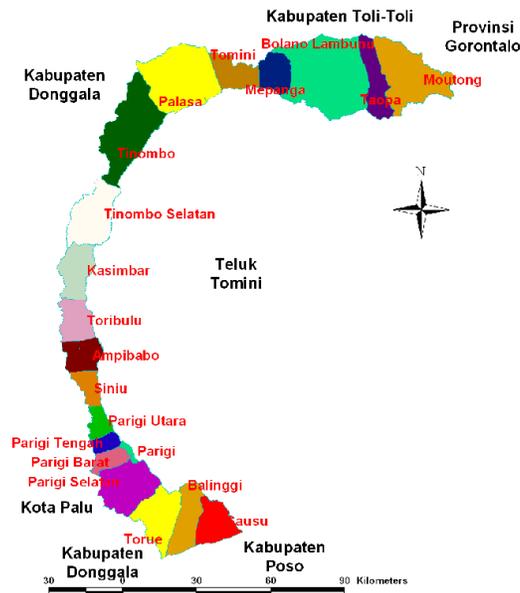
**Kata Kunci:** Pemberdayaan nelayan, keterampilan nelayan, produktifitas ekonomi, percepatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi.

### **I. PENDAHULUAN**

Kabupaten Parigi Moutong memiliki 20 kecamatan, 5 kelurahan, dan 220 desa, dominan berada di garis pantai Teluk Tomini, memanjang dari selatan (Kecamatan Sausu) ke utara (Kecamatan Kecamatan Moutong), hingga perbatasan Provinsi Gorontalo. Penduduknya sebagian besar menggantungkan hidup di sektor perikanan, khususnya sebagai nelayan tradisional.

Teluk Tomini ditaksir memiliki potensi ikan secara lestari sebesar 587.256 ton/tahun, dengan luas areal penangkapan diperkirakan 28.208 Km<sup>2</sup>. Produksi perikanan laut di Kabupaten

Parigi Moutong hanya sekitar 22.638,98 ton pada tahun 2011 atau sekitar 3,9 % dari potensi lestari. Sungguhpun begitu produksi perikanan laut di wilayah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 2,78 % (BKPM Parigi Moutong, 2012). Hingga saat ini sektor pertanian tanaman pangan tetap dominan. Sumbangannya terhadap PDRB jauh melampaui sektor perikanan laut.



Gambar 1. Peta Kabupaten Parigi Moutong

Penduduk Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 421.234 jiwa. 231.933 jiwa (55,06 %) diantaranya masih berada pada garis kemiskinan. Sedangkan lainnya 83.400 jiwa (19,79 %) tergolong miskin atau berada di bawah garis kemiskinan (BPS Parigi Moutong, 2012). Jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan dan kategori miskin (dibawah garis kemiskinan), sebagian besar adalah nelayan. Dengan demikian dapat dikemukakan, kehidupan ekonomi nelayan di Kabupaten Parigi Moutong belum terlalu menggembirakan. Bahkan secara turun temurun terus didera kemiskinan. Padahal setiap hari mereka bekerja dengan etos mencengangkan (Waris, 2012). Fakta dilapangan menunjukkan, umumnya mereka itu bekerja subsisten, bekerja dengan hasil untuk hidup hari ini. Apa yang akan dimakan besok, bagi mereka, dipikirkan dan diusahakan besok. Demikian seterusnya, kehidupan mereka tetap miskin.

Nelayan di Kabupaten Parigi Moutong, jika dikaitkan dengan potensi lestari Teluk Tomini di bidang hasil laut, terutama perikanan, mestinya dapat menikmati kehidupan layak, jauh dari kemiskinan. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Berbagai faktor yang menyebabkan mereka kurang atau tidak mampu menikmati potensi itu. Untuk itu mereka perlu diberdayakan, sehingga mereka mampu menolong dirinya untuk survive, keluar dari jerat kemiskinan. Konsep pemberdayaan nelayan yang jelas, sistematis, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menjawab permasalahan nelayan di Teluk Tomini Tersebut (Kusnadi, 2015: 10). Sebab, konsep pemberdayaan yang baik tentu saja memiliki misi khusus yaitu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 29-33). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses sosial yang terencana untuk memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat serta menstimulasi dan

memotivasi individu-individu agar mereka memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini ditunjang oleh upaya membangun asset material (ekonomi) untuk mendukung pengembangan kemandirian melalui organisasi atau kelembagaan sosial. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial (Pranarka dan Moeljarto, 1996: 61-63). Selain pengertian di atas, Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Delmira Syafrini, Nelayan VS Rentenir, 2014)

Sebetulnya menyangkut kehidupan nelayan di pesisir pantai Teluk Tomini Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah, khususnya pemerintah daerah tidaklah tinggal diam. Selama penelitian berlangsung diperoleh informasi, selama ini sungguh banyak program pemberdayaan, termasuk berbagai program pengentasan kemiskinan, telah diluncurkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Sangat disayangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, belum ada program yang berhasil memberdayakan nelayan. Kenyataan sehari-hari menunjukkan nelayan tetap akrab dengan kemiskinan.

Pada dasarnya program pemberdayaan dapat mencapai tujuan yang optimal dan efektif jika dirancang secara komprehensif. Dalam konteks ini *Asian Development Bank* (ADB), dalam Gunarto Latama (2002: 27) mengemukakan syarat-syarat program pemberdayaan yang komprehensif harus menampilkan karakteristik: a) berbasis local, b) berorientasi peningkatan kesejahteraan sosial, c) berbasis kemitraan, d) bersifat holistic, dan e) berkelanjutan. Dengan orientasi seperti itu konsep pemberdayaan diharapkan menjadi wacana alternative dan strategi efektif dalam membangun masyarakat yang memiliki keragaman sosial, budaya, lingkungan, dan geografis (Zubaedi, 2007: 99).

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikemukakan, nelayan di Kabupaten Parigi Moutong perlu diberdayakan dengan menggunakan konsep yang jelas. Dalam hal ini perlu dirumuskan model strategi pemberdayaan nelayan yang menjelaskan pemanfaatan dan pengembangan potensi kelautan berbasis masyarakat nelayan. Selanjutnya model tersebut menjadi salah satu masukan untuk penyapan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan.

### **Analisis Strategi Pemberdayaan Nelayan Sebagai Model Penyelesaian Masalah**

Sungguh beragam dan pelik permasalahan yang membelit nelayan di Kabupaten Parigi Moutong. Permasalahan itu menjeratnya selama ini sehingga mereka terus menerus terbelakang dan secara ekonomi berada dalam kondisi miskin. Di dalam perkembangannya, mereka tidak berdaya menyelesaikan masalahnya. Secara umum, masalah yang dihadapi oleh nelayan Kabupaten Parigi Moutong, adalah masalah menyangkut penguasaan Teknologi dan Non Teknologi. Untuk mengatasinya dua permasalahan utama itu yang harus dicarikan jalan penyelesaian. Jika diurai lebih jauh masalah teknologi penangkapan mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma nelayan dari tradisional ke modern

2. Penguasaan teknologi penangkapan ikan
  3. Penguasaan teknologi budidaya perikanan
  4. Penguasaan teknologi pasca panen
  5. Penguasaan teknologi dan perilaku mendukung keberlanjutan ekologi laut
- Sedangkan permasalahan menyangkut non teknologi menyangkut berbagai aspek, sebagai berikut :

1. Etos kerja
2. Pemahaman menyangkut keragaman di dalam masyarakat nelayan
3. Hubungan kerja antar nelayan yang adil dan bermartabat
4. Pemahaman dan implementasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga
5. Pemahaman dan implementasi penyelesaian masalah secara berkelompok (pembentukan Organisasi Nelayan)
6. Pembentukan koperasi yang ide dan keinginannya berasal dari nelayan
7. Dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak swasta menyangkut penyiapan dan penyediaan modal kerja
8. Dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak swasta terhadap peningkatan kemampuan nelayan dan keluarga pada berbagai bidang menyangkut kehidupan nelayan, terutama menyangkut peningkatan taraf hidup.
9. Tingkat pendidikan nelayan
10. Gaya hidup nelayan
11. Pemasaran hasil tangkapan
12. Infrastruktur
13. Zonasi wilayah penangkapan ikan yang berpihak pada nelayan kecil dan tradisional.
14. Dukungan pelestarian dan kesinambungan laut sebagai ekosistem yang harus dijaga bersama karena menyangkut nasib umat manusia di masa mendatang.

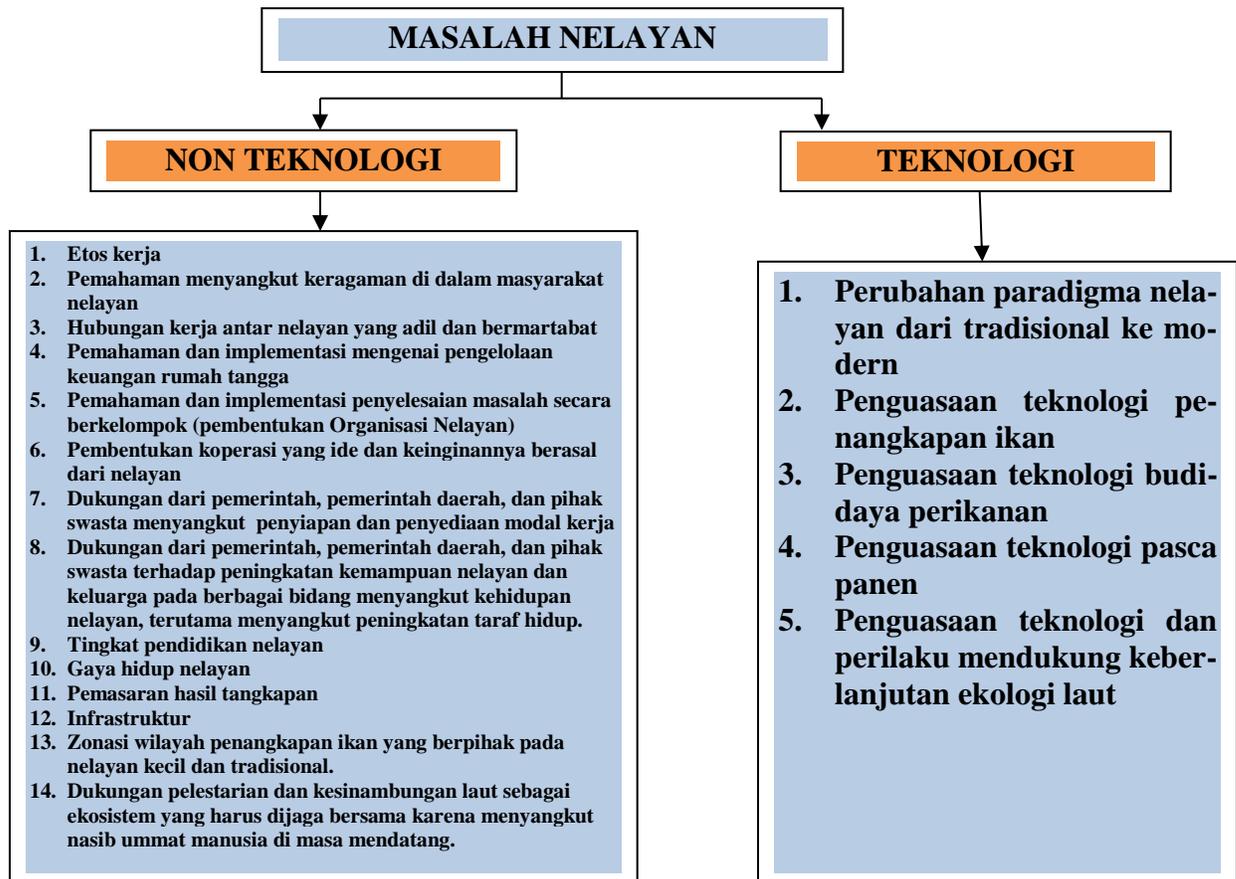
## **1. Strategi Pemberdayaan Nelayan di Bidang Non Teknologi**

Jika nelayan di Kabupaten Parigi Moutong hendak diberdayakan, berbagai masalah yang dikemukakan di atas mestinya menjadi prioritas untuk dicari solusinya. Dalam hal ini perlu konsep yang jelas, sistematis, dan terukur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari aktifitas penelitian yang telah dilakukan, antara lain: observasi, wawancara mendalam dengan sejumlah informan, *Focus Group Discussion* (FGD), penelusuran dan analisis data sekunder, dan studi pustaka, dikemukakan hasil analisis penelitian ini, sebagai berikut.

### **1.1. Etos kerja**

Etos kerja nelayan di Kabupaten Parigi Moutong di nilai oleh banyak pihak, agak lemah. Hal tersebut jelas, masalah. Sebab, salah satu penentu sukses setiap orang menapaki kehidupannya adalah adanya etos kerja tinggi, bekerja tanpa mengenal lelah, ditambah dengan semangat dan motivasi tinggi. Untuk menumbuhkan etos kerja itu, tentu tidaklah mudah.

**Bagan 1.**  
**Permasalahan Nelayan di Kabupaten Parigi Moutong**



**Sumber: Hasil penelitian tahun 2016 & 2017.**

Menurut Anoraga (1992: 24) Etos Kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia, maka etos kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka Etos Kerja dengan sendirinya akan rendah. Dalam konteks pengertian itu untuk meningkatkan etos kerja nelayan itu, bukanlah perkara mudah, sebab menyangkut nilai luhur yang diyakininya mengenai kerja. Untuk mengubahnya, mula-mula perlu diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan penelitian untuk mengetahui mengapa etos kerja nelayan rendah sehingga kurang sejalan dengan perkembangan jaman yang penuh dinamika. Selanjutnya pemerintah perlu melakukan tindaklanjut terhadap saran atau rekomendasi hasil penelitian tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya, adalah edukasi yang melibatkan semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah, menyangkut pentingnya etos kerja itu. Tentu saja mengubah etos kerja nelayan tersebut bukanlah hal mudah, sebab hal tersebut menyangkut perubahan paradigma. Sungguhpun begitu semua pihak tidak boleh menyerah atas kesulitan itu, sebab etos kerja merupakan bagian yang mesti diubah jika hendak mencapai kemajuan. Hal yang jauh lebih penting, adalah kesadaran dari para nelayan di Kabupaten Parigi Moutong tentang pentingnya berubah. Sebab walaupun semua pihak

menghendaki adanya perubahan, akan tetapi yang bersangkutan sendiri enggan berubah, maka perubahan itu juga akan tetap jauh dan menjauh.

## **1.2. Pemahaman menyangkut keragaman di dalam masyarakat nelayan**

Para nelayan di Kabupaten Parigi Moutong datang dari perbedaan, setidaknya dalam hal budaya. Mereka tidak berasal dari satu etnis. Secara umum mereka datang dari etnis atau suku: Bugis, Gorontalo, Manado, Jawa, Kaili dan suku asli atau sub etnis setempat seperti sub etnis: Tialo, Lauje, Tomini, Bajo. Suku asli jelas, sejak dahulu kala hidup secara turun temurun di wilayah tersebut, sedangkan suku pendatang keberadaannya belum lama. Menurut Koentjaraningrat (1990:181), budaya adalah daya dari budi berupa cipta, karsa dan rasa. Budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikir, dirasa dan direnung kemudian diamalkan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Pengertian ini menjelaskan bahwa setiap budaya membawa kekhasan di dalam penerapan budi, sehingga budaya masyarakat yang satu dan lainnya boleh jadi berbeda. Hal itu tentu saja berpotensi melahirkan konflik sebagai konsekuensi dari perbedaan.

Agar perbedaan itu dapat diubah menjadi “energy” kemajuan masyarakat nelayan setempat, interaksi antar suku di dalam masyarakat nelayan perlu disadari betul keberagaman adalah suatu keniscayaan dan tidak mungkin dapat dielakkan. Jika keberagaman tersebut tidak disikapi dengan baik, maka kemungkinan akan melahirkan persaingan yang tidak sehat yang bisa saja berujung konflik. Agar hal tersebut tidak terjadi para nelayan sendiri yang harus menyadari, keberagaman sesungguhnya adalah energy luar biasa untuk menggapai kemajuan secara bersama baik di waktu kini maupun di waktu mendatang. Setiap etnik pada masyarakat nelayan itu mestinya memandang dan menyadari, jika kemampuan yang berbeda dari ragam etnik yang ada itu disatukan, tentu saja kendala apapun yang menghalangi masyarakat beroleh kemajuan dapat diatasi. Nelayan mestinya menyatukan diri dari perbedaan tersebut untuk mencari solusi menemukan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah daerah harus tampil sebagai pihak yang terus menerus menginisiasi timbulnya dan terpeliharanya semangat persatuan, semangat kebersamaan sebagai suatu entitas yang merupakan bahagian dari masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia. Pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait secara berkala melakukan pertemuan atau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat nelayan untuk berdiskusi menyangkut berbagai kendala dalam kaitannya dengan hidup bersama di dalam keberagaman. Masyarakat nelayan diajak atau diberi pemahaman agar saling menghargai, saling menghormati, dan masing-masing memberi sumbangsih peran dalam mengatasi perbedaan di dalam keberagaman itu. Goal yang diharapkan, adalah tercipta masyarakat yang rukun, damai, saling menolong, saling melengkapi, dan jauh dari konflik, serta terbiasa bersaing secara sehat.

## **1.3. Hubungan kerja antar nelayan yang adil dan bermartabat**

Hubungan kerja antar nelayan di Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pekerja lain di wilayah lain, tentu saja berlangsung secara intens. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hubungan kerja antar nelayan seringkali berlangsung secara eksploitatif. Artinya terdapat pihak yang dirugikan, dan ada pula pihak lainnya yang mereguk keuntungan luar biasa dari hubungan itu. Misalnya hubungan antara Bos (Pemilik Modal) yang mempekerjakan atau pemilik kapal pajala ataupun bagang seringkali merugikan nelayan. Di lain sisi nelayan seringkali dirasakan merugikan pihak Bos, yaitu mangkir atau tidak datang bekerja dengan berbagai alasan.

Hubungan yang seringkali juga dirasakan kurang setara sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan, adalah hubungan nelayan dengan Pandola (pembeli ikan), dan penampung ikan. Pihak-pihak ini seringkali mempraktekkan perilaku rentenir kepada nelayan. Fenomena hutang dan rentenir sebetulnya merebak atau terjadi pada komunitas nelayan di Indonesia saat ini. Sebagian besar nelayan di Indonesia digambarkan sebagai komunitas yang hidup subsisten dengan pendapatan yang tidak hanya kecil, tapi juga tidak menentu (Yustika dalam Delmira Syafrini, *Nelayan Vs Rentenir*, 2014).

Agar hubungan tersebut dapat berlangsung baik, pemerintah daerah khususnya SKPD terkait mengusahakan membuat aturan atau kesepakatan antara pihak-pihak itu tentang bagaimana menciptakan hubungan kerja yang harmonis, setara, dan saling menguntungkan itu. Semua pihak yang berkaitan dengan kehidupan nelayan dan pihak nelayan sendiri oleh pemerintah daerah diajak duduk bersama merumuskan bagaimana gerangan hubungan itu dapat berlangsung yang saling membesarkan, saling menguntungkan, saling menghargai dan menghormati. Misalnya bagaimana hubungan majikan (Bos), juragan, dan nelayan yang dipekerjakan, menyangkut bagi hasil atau upah nelayan Kapal Pajala dan Bagang. Demikian pula pengaturan harga yang mengikuti mekanisme pasar dapat diciptakan sehingga semua pihak dapat diuntungkan. Demikian pula dalam hal penyelesaian hutang nelayan ditetapkan sedemikian rupa, sehingga nelayan tidak menjadi objek hisapan kalangan lintah darat, yaitu pihak yang dicurigai: Pandola dan Penampung Ikan (Pembeli Ikan). Untuk mewujudkan semua itu diperlukan inisiasi dan peran pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait.

#### **1.4. Pemahaman dan implementasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga**

Seperti telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, nelayan Kabupaten Parigi Moutong umumnya memiliki kemampuan pengelolaan keuangan buruk. Mereka mencari nafkah hari ini, hasilnya dihabiskan juga hari ini. Nafkah besok dicari besok dan dihabiskan pula saat itu. Tentu saja budaya pengelolaan keuangan seperti itu buruk bagi masa depan nelayan. Sebab tidak ada hasil yang dapat disimpan untuk bekal hari-hari berikutnya ataupun bekal jangka panjang, misalnya menyekolahkan anak, memiliki simpanan yang kelak dapat dijadikan modal kerja, dan lain-lain. Menurut Marini, dkk (2016), Masyarakat nelayan memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan masyarakat industri atau masyarakat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat terhadap karakteristik ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi maupun budaya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan sebagian besar dapat dikatakan memprihatinkan. Hal ini terjadi karena hambatan fisik yang besar dan kondisi iklim yang tidak menentu membuat daya tahan ekonomi rumah tangga nelayan rendah.

Hal yang dialami nelayan sebagaimana dikemukakan di atas, mestinya berangsur-angsur diakhiri. Dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait menginisiasi berlangsungnya program yang dapat memandu masyarakat nelayan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga. Pemerintah daerah diharapkan banyak melakukan pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha untuk memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat.

#### **1.5. Pemahaman dan implementasi penyelesaian masalah secara berkelompok (Pembentukan Organisasi Nelayan)**

Sejauh yang diamati dan ditemukan selama penelitian berlangsung, nelayan di Kabupaten Parigi Moutong belum gemar menyelesaikan masalah secara bersama atau berkelompok. Sungguhpun mereka seringkali bekerja berkelompok, seperti yang bekerja pada Kapal Pajala dan

Bagang, akan tetapi sesungguhnya di luar dari pekerjaan itu mereka menyelesaikan permasalahannya secara sendiri-sendiri.

Pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait diharapkan dapat memandu dan selalu mendorong masyarakat nelayan menyelesaikan masalah secara berkelompok. Misalnya membentuk organisasi yang dapat menjadi wadah yang menyatukan mereka sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Organisasi itu dapat mewakili para nelayan bernegosiasi dengan siapapun saja, dengan organisasi apapun saja, termasuk tatkala harus berhadapan dengan pemerintah dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan. Pentingnya artinya pemerintah daerah menginisiasi masyarakat nelayan memiliki kesadaran kelompok. Di bidang social, budaya, dan politik mestinya nelayan memiliki kelompok. Demikian pula di bidang ekonomi, nelayan mestinya membuat koperasi. Selama ini memang sudah ada koperasi, akan tetapi bentukan pemerintah sejalan dengan adanya program bantuan untuk nelayan. Akibatnya koperasi itu juga nasibnya tidak ketahuan lagi sejalan dengan berakhirnya program. Koperasi yang dimaksudkan di sini, adalah koperasi yang memang murni bentukan masyarakat tanpa paksaan atau arahan dari siapapun. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait mendorong munculnya prakarsa mendirikan koperasi yang muncul dan lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait hanya memfasilitasi saja hal yang timbul dari upaya nelayan itu mendirikan koperasi.

#### **1.6. Pembentukan Koperasi**

Nelayan dan komunitas desa pesisir, pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah dan acapkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Menurut Melani, dkk ([riset.umrah.ac.id/wp-content/](http://riset.umrah.ac.id/wp-content/)) nelayan (tradisional) bukan saja sehari-hari harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan. Melihat fenomena ini maka perlu adanya kegiatan perekonomian berbasis kerakyatan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat nelayan. Kegiatan perekonomian yang dapat dengan mudah menyesuaikan perannya dengan kebutuhan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir adalah koperasi. Koperasi menjadi suatu kegiatan perekonomian yang dapat diandalkan karena ia berhubungan langsung dengan barang atau produk maupun dengan jasa-jasa yang berkaitan dengan masyarakat pesisir dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Diyakini koperasi mampu mengakhiri dominasi Bos (pemilik Kapal Pajala dan Bagan), untuk menyebut pengusaha lokal yang menguasai aktifitas penangkapan ikan mulai dari penyiapan dan pembiayaan penangkapan ikan hingga pemasaran termasuk memberi pinjaman kepada nelayan, dan pihak lainnya yang menjalankan praktek rentenir. Koperasi yang dibentuk diharapkan diinisiasi dan dilakukan sendiri oleh nelayan, tentu dengan pendampingan dari pemerintah daerah ataupun pihak lain yang pro kepada nelayan, seperti LSM dan lembaga lainnya. Lembaga ini diharapkan berfungsi membeli ikan nelayan, menyediakan semua kebutuhan nelayan, termasuk bahan bakar. Para nelayan sebagai anggota koperasi dapat mengakses berbagai hal pada lembaga tersebut. Koperasi tersebut membeli hasil nelayan secara pantas dan menjualnya kembali ke berbagai tempat secara menguntungkan, sehingga koperasi berangkutan dapat hidup dan menguntungkan anggotanya. Demikian pula dengan pemenuhan keperluan sehari-hari, disiapkan oleh koperasi, untuk kemudian dibeli oleh nelayan dengan harga pantas, dan tetap menguntungkan koperasi.

### **1.7. Dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak swasta menyangkut penyiapan dan penyediaan modal kerja**

Nelayan Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan roda aktifitasnya memerlukan penambahan modal kerja. Banyak program pemerintah yang menyiapkan bantuan dana atau modal kerja, termasuk pemberian dan penyediaan peralatan tangkap, akan tetapi tampaknya nelayan seringkali tidak disiapkan mentalnya dalam bentuk sosialisasi mengenai apa, bagaimana, dan tujuan program tersebut. Sebagai akibatnya modal kerja dan peralatan tangkap yang disediakan oleh pemerintah sebagai suatu program kebanyakan kurang membuahkan hasil. Pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait perlu melakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana cara efektif menyangkut pemberian modal kerja kepada para nelayan. Nelayan Kabupaten Parigi Moutong memiliki karakteristik sendiri yang boleh jadi berbeda dengan nelayan lainnya di Nusantara. Karena itu pemerintah daerah dan pihak lainnya yang bermaksud membantu nelayan dalam bentuk memberikan modal kerja perlu terlebih dahulu membantu nelayan menyiapkan diri, menyiapkan mental sedemikian rupa sehingga modal kerja ataupun peralatan kerja yang diberikan dapat bermanfaat dengan pencapaian tujuan yang maksimal.

### **1.8. Dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak swasta terhadap peningkatan kemampuan nelayan dan keluarga pada berbagai bidang menyangkut kehidupan nelayan, terutama menyangkut peningkatan taraf hidup.**

Berbagai program dan bantuan untuk nelayan di Kabupaten Parigi Moutong hendaknya terus dilanjutkan. Program-program tersebut, baik yang disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong hendaknya di evaluasi terus menerus. Hal ini penting agar untuk tindak lanjut penyempurnaannya di waktu mendatang.

Nelayan Kabupaten Parigi Moutong harus terus menerus ditingkatkan kemampuannya. Peningkatan tersebut bukan saja dalam hal pembeberian modal kerja dan peralatan tangkap, akan tetapi juga menyangkut keterampilan sebagai nelayan tangkap yang mengenal alat/peralatan tangkapan yang modern, mudah dioperasikan, dan ramah lingkungan. Dalam hal ini pemerintah daerah mestinya tampil sebagai pihak yang membantu para nelayan itu dengan sepenuh hati. Harus diakui, telah banyak program bantuan yang diluncurkan pemerintah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong. Sungguhpun begitu di waktu mendatang program tersebut diharapkan terus berlanjut bahkan di tambah lagi dengan program lainnya. Program yang ada itu hendaknya tidak saja menasar para nelayan, akan tetapi ibu rumah tangga dan para remaja sebagai anggota keluarga mestinya juga dipikirkan untuk dibantu meningkatkan kemampuannya. Misalnya peningkatan kemampuan di bidang budidaya perikanan, pengenalan teknologi pasca panen. Semua itu tentu saja jika berhasil dapat saling melengkapi dan saling memperkuat dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga nelayan.

### **1.9. Tingkat pendidikan nelayan**

Fakta menunjukkan umumnya nelayan di Kabupaten Parigi Moutong berpendidikan rendah. Terbanyak tamat SD dan SMP. Kemajuan diberbagai kehidupan, antara lain di bidang nelayan dengan segala dinamikanya, memerlukan sumberdaya manusia unggul, sehingga juga diperoleh kemampuan bersaing di bidang kelautan. Tanpa keunggulan sumberdaya manusia,

maka akan sulit diperoleh pengelolaan yang baik sector kelautan itu. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong hendaknya menyadari hal tersebut. Peningkatan kemampuan SDM nelayan Kabupaten Parigi Moutong hendaknya menjadi prioritas untuk ditingkatkan kemampuannya, melalui pendidikan, siapapun yang terpilih menjadi Bupati. Tentu saja peningkatan pendidikan dalam hal ini tidak lagi ditujukan kepada nelayan yang ada sekarang, akan tetapi generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi oenerus nelayan. Mereka ini sedang duduk pada berbagai level pendidikan dasar, menengah, dan beberapa diantaranya mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Pemerintah daerah harus mendorong generasi emas itu untuk bersekolah setinggi-tingginya. Dengan cara terus menerus menyediakan pembangunan sekolah, baru dipermukiman nelayan, pembangunan rua kelas baru sesuai kebutuhan, pembangunan infrastruktur pendidikan lainnya seperti Lab IPA, Lab Bahasa, dan lain-lain. Sekolah gratis sebaiknya terus digalakkan buat generasi muda nelayan. Penyediaan beasiswa untuk anak nelayan pada semua level pendidikan, dan pemberian insentif berupa beasiswa dan bebas SPP bagi anak nelayan yang mau dan mampu meraih pendidikan tinggi di bidang kelautan untuk kemudian yang bersangkutan nantinya pula kedaerhanya mengelola laut dengan segala dinamikanya. Hal itulah yang harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

#### **1.10. Gaya hidup nelayan**

Gaya hidup nelayan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsumtif di tengah etos kerja yan tingkatannya rendah. Dua hal ini berakumulasi sedemikian rupa menyebabkan mereka sulit meningkatkan taraf kehidupannya, keluar dari jerat kemiskinan. Untuk mengakhiri gaya hidup konsumtif ini, memang bukanlah perkara gampang. Sebab masyarakat nelayan besera keluarganya sebagaimana juga anggota masyarakat lainnya yang bukan nelayan, berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Mereka sangat terbuka menerima perubahan jaman.

Untuk mengatasi sikap konsumtif ini berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus rajin memfasilitasi, melakukan penyuluhan menyangkut upaya mengakhiri gaya hidup kosumtif itu. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat perlu turun tangan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup sederhana, tidak boros, dan tidak meniru cara hidup yang tidak sesuai dengan budaya yang dijadikan acuan selama ini. Pendapatan yang diperoleh sehari-hari hendaknya digunakan secara arif dan bijaksana. Perilaku gemar berhutang hendaknya dihentikan, digantikan oleh perilaku yang gemar menabung. Pengetahuan dan pemahaman seperti ini sesungguhnya sudah diketahui oleh umumnya masyarakat, akan tetapi terdapat kecenderungan mereka melupakannya sebagai akibat tarikan modernisasi yang sungguh luar biasa melanda desa sebagaimana yang selalu mereka tonton melalui media TV.

#### **1.11. Pemasaran hasil tangkapan**

Salah satu masalah yang membelit nelayan dalam meningkatkan pendapatannya adalah soal pemasaran hasil tangkapan. Seperti telah diungkap sebelumnya pemasaran hasil tangkapan tidak ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar, akan tetapi ditentukan oleh para pembeli seperti Pandola, pembeli penampung atau pengumpul, bahkan oleh Bos (pemilik kapal pajala atau bagang) yang memiliki modal membeli ikan sekaligus memasarkannya karena mereka memiliki mobil yang selalu siap membawa hasil tangkapan nelayan ke wilayah manapun.

Sebagai akibatnya harga ditentukan oleh mereka. Tentu saja nelayan sebagai pihak yang dirugikan dan tidak merasakan nikmat harga ikan.

Dalam konteks hubungan seperti itu tentu saja tidak akan terjadi percepatan dan perluasan ekonomi seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Bahkan yang terjadi adalah eksploitasi nelayan. Untuk mengatasinya pemerintah daerah perlu membangun dan mengaktifkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang selama ini kurang termanfaatkan. Pemerintah daerah harusnya memaksa nelayan menjual hasil tangkapannya di TPI dengan pengawasan pemerintah sehingga berlangsung atau terwujud harga ikan sesuai mekanisme pasar. Selain itu pemerintah daerah melalui SKPD terkait perlu mendorong masyarakat nelayan membuat koperasi atau menghidupkan koperasi yang telah dibentuk sebelumnya (pengurus baru sesuai yang dikehendaki masyarakat). Koperasi itu, sebagai langkah awal, mendapatkan bantuan dana (pinjaman) dari pemerintah daerah dan dampingan manajemen hingga pengurus koperasi itu mampu berjalan sendiri. Hal ini dimaksudkan, koperasi nantinya diharapkan dapat memotong rantai ikatan rentenir dan berbagai pihak yang mencekik nelayan dengan pinjaman yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap pemasaran hasil tangkapan. Tentu saja penggunaan TPI dan pembuatan/revitalisasi koperasi itu tidak mudah melembagakannya kepada nelayan. Namun, untuk menjadikan nelayan sebagai bagian dari upaya mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong, upaya tersebut kiranya menjadi salah satu syaratnya.

#### **1.12. Infrastruktur**

Infrastruktur, seperti: tambatan perahu, dermaga tempat membongkar hasil tangkapan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), aula pertemuan nelayan, dan lain-lain sangat diperlukan oleh nelayan Kabupaten Parigi Moutong. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong memerlukan nelayan sebagai salah satu pihak yang berperan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah mestinya mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung aktifitas nelayan. Agar infrastruktur tersebut dapat digunakan, pemerintah daerah sebelum membangun sebaiknya terlebih dahulu melakukan feasibility study mengenai letak infrastruktur yang akan dibangun itu. Beberapa infrastruktur, khususnya TPI yang telah dibangun oleh pemerintah daerah akan tetapi tidak pernah digunakan oleh nelayan Karena pemilihan tempatnya tidak disukai atau menyulitkan nelayan. Demikian pula dengan pembangunan tambatan perahu atau dermaga tempat membongkar hasil tangkapan nelayan.

#### **1.13. Zonasi wilayah penangkapan ikan yang berpihak pada nelayan kecil dan tradisional.**

Nelayan tradisional dan kecil jika difasilitasi dan dibantu secara benar jelas mereka merupakan bagian yang dapat mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah mereka yang besar menjadi penentu hal itu. Bahkan mereka menjadi penopang utama terwujudnya percepatan dan perluasan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong.

Untuk mewujudkan komitmen itu pemerintah daerah harus melindungi nelayan kecil itu dengan mengimplementasikan zonasi penangkapan ikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keluhan nelayan kecil wilayah mereka sringkali dirambah oleh kapal-kapal besar, bahkan dari wilayah lain. Bulan itu saja banyaknya Rumpon menyebabkan ikan-ikan yang tadinya berada dipinggir yang menjadi wilayah tangkapan nelayan kecil berkumpul di rumpon yang dimiliki oleh pemodal besar (Bos). Semua itu harus diatur sehingga menguntungkan semua

pihak. Pengaturannya disarankan juga, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan Kabupaten Parigi Moutong.

#### **1.14. Dukungan pelestarian dan kesinambungan laut sebagai ekosistem yang harus dijaga bersama karena menyangkut nasib ummat manusia di masa mendatang.**

Laut harus dipelihara secara berkesinambungan. Laut adalah sumber kehidupan, terutama sebagai tempat nelayan mencari nafkah. Teluk Tomini adalah masa depan Kabupaten Parigi Moutong. Teluk Tomini, dengan potensi lestari ikan yang dimilikinya, jelas jika dikelola secara baik dan benar akan berkontribusi terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Berangkat dari pemikiran itu Teluk Tomini harus dijaga, tidak dicemarkan, penangkapan ikan harus diatur dengan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Semua itu dimaksudkan untuk melestarikan ekosistem laut Teluk Tomini, sehingga teluk tersebut secara berkesinambungan dapat menyediakan aneka ikan dan hasil lain yang mensejahterakan.

Untuk keperluan itu pemerintah daerah perlu mengatur banyak hal. Konkretnya pemerintah daerah perlu membuat Peraturan Daerah yang berisi perlindungan dan pemberayaan nelayan, termasuk didalamnya upaya menjaga pelestarian eksistem laut.

### **2. Strategi Pemberdayaan di Bidang Teknologi**

Untuk mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong, mengelola laut dengan fokus pemberdayaan nelayan, hal yang perlu dibenahi, terutama oleh pemerintah daerah dikemukakan pada uraian berikut.

#### **2.1. Perubahan paradigma nelayan dari tradisional ke modern**

Nelayan di Kabupaten Parigi mouton umumnya masih tradisional, menggunakan asal sederhana, dan sebagian dengan etis kerja yang belum terlalu menggembirakan. Agar nelayan itu, sungguhpun nelayan kecil, menjadi bagian dari pihak yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka perubahan paradig mereka harus diupayakan. Pemerintah daerah mestinya berupaya melakukan perubahan paradig nelayan dari tradisional ke modern. Cara berpikir, persepsi, dan perilaku mereka harus diubah. Untuk keperluan itu pemerintah daerah diharapkan membuat pelatihan dan berbagai aktifitas yang dapat membawa nelayan itu pada perubahan paradig. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu mestinya dilakukan secara terencana, massif, dan sistematis. Melibatkan banyak pihak (stakeholders). Upaya ini mesti dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong.

#### **2.2. Penguasaan teknologi penangkapan ikan**

Salah satu kelemahan nelayan Kabupaten Parigi Moutong, adalah di bidang penguasaan teknologi penangkapan ikan. Pemerintah daerah diharapkan secara terencana, massif, dan sistematis tidak kenal menyerah memperkenalkan bahkan memberikan pendampingan penguasaan teknologi perikanan. Pemerintah daerah mestinya menggandeng pihak swasta dan LSM untuk kemudian bekerjasama melakukan hal tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah dan pihak lainnya melakukan assessment (penilaian) bersama dengan nelayan teknologi penangkapan ikan yang cocok bagi nelayan. Teknologi itu mestinya sederhana, tidak memerlukan modal besar, dan dioperasikan secara mudah baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebab, banyak teknologi yang dintrodusir oleh pemerintah daerah dewasa ini dikeluhkan oleh nelayan sehingga upaya pemerintah itu kurang berhasil.

Bahkan jika diperlukan pemerintah daerah atau pihak-pihak lainnya melakukan pendampingan terhadap pengoperasiannya. Hal itu sesungguhnya tidak terlalu sulit dilakukan. Sebab, aparat pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait memiliki aparat hingga di kecamatan. Upaya seperti ini perlu dilakukan jika nelayan Kabupaten Parigi Moutong dipandang sebagai pihak yang memiliki andil terhadap terwujudnya percepatan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong.

### **2.3. Penguasaan teknologi budidaya perikanan**

Nelayan juga mestinya diberi pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman di bidang budidaya perikanan. Banyak terdengar keluhan nelayan, ikan semakin menipis. Hal yang mungkin dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan, adalah dengan penguasaan teknologi budidaya ikan. Pemerintah daerah diharapkan memperkenalkan dan mendorong nelayan melakukan budidaya perikanan laut dan hasil laut lainnya. Misalnya budidaya rumput laut yang terbukti berhasil di banyak daerah di Indonesia. Demikian pula dengan budidaya Ikan Kerapu, Lobster, Ikan Napoleon untuk menyebut beberapa contoh yang berhasil di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat mereplikasi keberhasilan Pemda daerah lain di Indonesia. Jika hal itu dapat diwujudkan, maka nelayan dapat menjadi soko guru terhadap terwujudnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong.

### **2.4. Penguasaan teknologi pasca panen**

Nelayan Kabupaten Parigi Moutong, belum menguasai teknologi pasca panen. Demikian temuan penelitian ini. Pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya diharapkan memperkenalkan atau memfasilitasi berbagai aktifitas menyangkut teknologi pasca panen yang teknologinya sederhana sehingga mudah dioperasikan dan memerlukan modal yang tidak besar. Upaya ini penting untuk memberi nilai tambah pada setiap hasil tangkapan nelayan. Hal ini juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya, menjadikan Teluk Tomini dengan nelayan yang mengail rejeki di sana, sebagai bagian dari upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Atas dasar temuan penelitian tahun pertama (tahun 2016) yang kemudian dikombinasikan dengan temuan penelitian tahun kedua (tahun 2017) sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan langkah konkret sebagai ringkasan model pemberdayaan nelayan di Kabupaten Parigi Moutong yang perlu diimplementasikan, sebagai berikut :

1. Perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan mengacu pada fakta atau realitas yang dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan tradisional, sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk model strategi pemberdayaan nelayan yang menjadi luaran penelitian “Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Pantai Teluk Tomini, Dalam upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kab Parigi Moutong tahun pertama (2016) dan tahun kedua (tahun 2017). Perda tersebut keberadaannya sungguh penting karena mengikat semua pihak yang berkaitan dengan nelayan di Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai langkah awal, penelitian tahun kedua ini menghasilkan draft Naskah Akademik dan draft Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Parigi Moutong.

2. Perlu dirumuskan strategi pemberdayaan nelayan berbasis nelayan (*community based development*) yang lebih komprehensif, terencana, sistematis, jangka panjang dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan Teluk Tomini.,
3. Di bidang social, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu memperhatikan potensi konflik yang ada di tengah masyarakat nelayan. Potensi konflik yang terjadi, sedikit atau banyaknya, akan mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat nelayan. Sektor pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan masalah pengangguran perlu mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya perlu diintensifkan pendampingan yang sifatnya mempertahankan nilai kearifan local. Sebelum dilakukan pendampingan, terlebih dahulu perlu dilakukan pelatihan kader desa yang akan melakukan pendampingan tentang upaya mempertahankan nilai atau kearifan local seperti gotong royong, saling menghargai perbedaan, nilai kerukunan, dan lain-lain.
4. Di bidang budaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu memberi ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya setempat. Sedangkan budaya kaum pendatang perlu pula diberi ruang tampil sebagai pendukung tampilnya budaya setempat. Dengan cara itu diharapkan akan terjadi akulturasi budaya. Untuk kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu memberikan pelatihan kader desa yang berfungsi melestarikan dan mendorong tumbuh-kembangnya budaya local bersama dengan budaya kaum pendatang.
5. Di bidang politik, masyarakat perlu berhimpun pada suatu paguyuban. Himpunan atau perkumpulan ini penting untuk merawat kebersamaan, persatuan, dan bahkan melalui perkumpulan itu prinsip-prinsip berdemokrasi dapat dikembangkan, antara lain menghargai perbedaan dan selalu menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Paguyuban atau perkumpulan ini dalam perkembangan selanjutnya dapat mewakili masyarakat nelayan berdiskusi dengan pemerintah pada semua level, sehingga masyarakat nelayan dapat diperhatikan dan terlayani kebutuhannya sebagai warga Negara yang harus diberdayakan. Untuk kepentingan ini pemerintah daerah perlu menciptakan iklim demokrasi yang kondusif untuk munculnya kelompok masyarakat ini. Diharapkan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dan desa dapat bermitra, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan, bahkan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan.
6. Di bidang ekonomi, beberapa hal perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi nelayan sebagai berikut :
  - a. Pemberdayaan nelayan harus mempertimbangkan, dan bahkan harus bertumpu pada keberadaan pranata sosial-budaya di masing-masing komunitas lokal nelayan. Hal ini penting dilakukan agar konsep-konsep pemberdayaan yang diintrodusir dapat diterima oleh masyarakat tanpa merasa tercabut dari akar budayanya.
  - b. Melakukan pemberdayaan pada nelayan dengan tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek namun lebih berorientasi pada pemupukan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis.
  - c. Berusaha mengurangi kerentanan kesulitan ekonomi keluarga nelayan dengan cara meningkatkan daya tahan dan nilai tawar dari produk yang mereka hasilkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan tekanan kehidupan ekonomi sehari-hari yang menghimpit.
  - d. Melakukan pemberdayaan perempuan, yakni remaja dan ibu rumah tangga dalam upaya mendukung proses penguatan penyangga ekonomi keluarga.

- e. Memutuskan mata rantai hubungan eksploitasi ekonomi atau sistem ijon, yang selama ini merugikan posisi nelayan tradisional. Tetapi tidak semata-mata mengandalkan kebijakan regulasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, melainkan bertumpu pada pemberdayaan komunitas nelayan tradisional itu sendiri sebagai sebuah kelompok sosial.
- f. Memberikan sosialisasi kepada para nelayan, khususnya nelayan tradisional sekaligus memberikan pelatihan untuk bekerja lebih profesional, dan pelan-pelan mulai mengakses perkembangan teknologi modern penangkapan ikan segar secara kuantitatif sehingga produktivitas kerja mereka dapat meningkat lebih pesat dan lebih besar tanpa mengganggu kelestarian sumber daya alam.
- g. Pengembangan kelompok nelayan tidak dapat hanya didekati dari sudut yang sempit atau secara sektoral. Pengembangan suatu sistem yang didasari oleh pendekatan pembangunan masyarakat, merupakan cara yang terbaik. Dalam hubungan ini, pengembangan kualitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang dan atau pemanfaatan infrastruktur yang telah ada kedalam skenario pengembangan, merupakan suatu pola pembangunan masyarakat yang memerlukan perumusan permasalahan secara terintegrasi. Interaksi fungsional keseluruhan variabel strategis tersebut diharapkan sanggup menciptakan proses pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan yang dapat mempertahankan diri dan terlindungi dari pola interaksi yang sehat dengan kelembagaan lain yang sejenisnya dan atau yang terkait dalam menjalankan usahanya.
- h. Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan dirumuskan, baik dalam bentuk peraturan daerah, maupun aturan main koperasi nelayan dan atau unit usaha nelayan yang terbentuk sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok nelayan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun aspek-aspek tersebut, paling tidak menyangkut beberapa hal utama :
  - Rumusan bentuk *profit sharing* antara anggota kelompok nelayan, koperasi dan pelaku ekonomi swasta (nasional atau asing).
  - Hak dan kewajiban anggota dan pola manajemen kelompok/koperasi/ unit usaha.
  - Sebagai lembaga yang menjembatani pihak nelayan dengan lembaga financial/perbankan dan kelompok nelayan.
  - Perluasan pelayanan koperasi atau kelompok nelayan yang bersifat non ekonomis, seperti pelayanan jasa financial, bantuan teknis baik terhadap usaha ekonomi yang dilakukan maupun terhadap pemeriharaan asset produksi yang dimiliki, maupun terhadap bantuan aktifitas sosial yang berkaitan dengan budaya setempat.
- i. Di bidang teknologi penangkapan ikan, beberapa hal disarankan sebagai berikut :
  - Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, perlu dilakukan pengembangan mata pencaharian alternatif melalui budidaya dan teknologi tepat guna. Untuk keperluan itu diperlukan pengembangan pengetahuan dalam bentuk pelatihan.
  - Pemerintah daerah perlu menginisiasi dan mendorong nelayan melakukan revitalisasi peralatan tangkap melalui adopsi teknologi yang sesuai dan diversifikasi perikanan tangkap.

- Pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur usaha perikanan yang memadai dengan melibatkan sektor swasta dengan tidak lupa melibatkan masyarakat nelayan pada perancangan atau perencanaannya.
  - Peningkatan peran pemerintah daerah dalam hal penjaminan kelestarian lingkungan sumberdaya pesisir dan laut, peningkatan pengawasan laut dari illegal fishing dan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
7. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjamin stabilitas harga jual ikan hasil tangkapan nelayan, penyediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung aktivitas kegiatan melaut nelayan, dan peningkatan program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta riset dan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan jaminan hidup.
  8. Pemberian akses modal dan pengembangan sarana pemasaran melalui koperasi atau dalam bentuk lain misalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 1992. *Psikologi Kerja*. PT. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten Parigi Moutong. 2012. *Peluang Investasi Daerah*. Parigi: BKPM Kabupaten Parigi Moutong.
- BPS Kabupaten Parigi Moutong. 2012. *Parigi Moutong Dalam Angka*. Parigi: BPS Kabupaten Parigi Moutong.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Terjemahan: Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press.
- Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Nomor 2, Volume I, Tahun 2014.
- Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Kusnadi. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir: Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Marini, Ida Ayu Ketut, dkk. *GaneÇ Swara* Vol. 10 No.2 September 2016.
- Melani, Winny Retna, Muzahar, Lily Viruly, Rina Dwi Lestari dalam [riset.umrah.ac.id/wp-content/](http://riset.umrah.ac.id/wp-content/), diakses pada Hari Rabu, 11/10/2017.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. "Pemberdayaan (Empowerment), dalam Onny S Prijono dan A.M.W. Pranarka (Peny.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, hlm. 44-70.
- Waris, Irwan, et.al. 2012. *Budaya Kerja Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Teluk Tomini*. Laporan Hasil Penelitian. Palu: FISIP-UNTAD.
- Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.